



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kepastian hukum tata cara pengalokasian alokasi dana desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. ADD Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
12. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
19. Pemblokiran adalah proses pembekuan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa dengan komposisi maksimal yaitu 1 (satu) orang sekretaris Desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi dan kepala kewilayahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- b. ADDM sebesar 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- c. ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa dan luas wilayah Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin desa dan luas wilayah Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin; dan
 - c. 30% (tiga puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin desa dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

(1) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. Penghasilan Tetap Desa_x terdiri atas:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa (m):

$$m = a1 \times 12 \text{ bulan}$$

a1 = besaran penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan APBDesa

2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (n):

$$n = a1 \times 80\% \times 12 \text{ bulan}$$

3. Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis (o):

$$o = a1 \times 60\% \times 6 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan}$$

4. Penghasilan Tetap Pelaksana Kewilayahan (p):

$$p = a1 \times 60\% \times q \text{ orang} \times 12 \text{ bulan}$$

q = Jumlah Pelaksana kewilayahan sesuai kebutuhan desa

5. Penghasilan Tetap Desa = m + n + o + p

b. ADDM Desa_x

$$= \frac{\text{ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap Desa se-Kab} \times 60\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

c. ADDP Desa_x

$$= [(0,30 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,30 \times Z3)] \times (\text{ADDkab} - \text{ADDMkab})$$

Keterangan:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

ADMKab = besaran ADD minimal untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

d. ADD Desa_x

$$= \text{Penghasilan Tetap Desa}_x + \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

(2) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. kegiatan pada bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 1. penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. pendataan Desa;
 3. penyusunan tata ruang Desa;
 4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. pengelolaan informasi Desa;
 6. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 10. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
 - c) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - d) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - e) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;lumbung Desa;
 - f) pembukaan lahan pertanian;
 - g) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - h) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - i) gudang pendingin;
 - j) tempat pelelangan ikan;
 - k) tambak garam;
 - l) kandang ternak;
 - m) instalasi biogas;
 - n) mesin pakan ternak;
 - o) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 5. pembinaan lembaga adat;
 - 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa;
 4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat berita acara perubahan penggunaan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu kepala Desa, sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua Badan Permasyarakatan Desa perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan ADD;
 - c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat.
- (2) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Bagi jabatan kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh penjabat kepala Desa, maka Penjabat kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi kepala Desa yang berhalangan tetap, penjabat kepala Desa bertanggung jawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif; dan
- b. bagi kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, penjabat kepala Desa bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum kepala desa bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan realisasi transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. peraturan Desa tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa);

- d. peraturan kepala Desa tentang rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun berjalan;
 - e. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - f. berita acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - g. keputusan kepala Desa tentang penggunaan ADD;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani kepala Desa atas penggunaan ADD; dan
 - i. laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (3) Camat menyampaikan surat rekomendasi permohonan pencairan dana transfer Desa kepada Bupati melalui DPKAD tembusan kepada BPMPD.
 - (4) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui BPMPD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

- (3) Sisa ADD di rekening kas umum Daerah yang terjadi akibat Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (5) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui BPMPD setiap akhir tahun anggaran bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 9 Tahun 2016
 TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

No	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	TOTAL ADD PROPORSIONAL	ADD _m	SILTAP	TOTAL ADD	TOTAL ADD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32.03.01.2001	CIANJUR	BABAKANKARET	93.673.294	122.583.051	252.000.000	468.256.344	468.258.000
2	32.03.01.2002	CIANJUR	NAGRAK	135.565.438	122.583.051	234.000.000	492.148.489	492.148.000
3	32.03.01.2003	CIANJUR	SUKAMAJU	85.471.683	122.583.051	216.000.000	424.054.734	424.055.000
4	32.03.01.2004	CIANJUR	MEKARSARI	108.125.836	122.583.051	234.000.000	464.708.887	464.709.000
5	32.03.01.2005	CIANJUR	LIMBANGAN SARI	93.518.260	122.583.051	234.000.000	450.101.311	450.101.000
6	32.03.02.2002	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	85.382.029	122.583.051	234.000.000	441.965.080	441.965.000
7	32.03.02.2006	WARUNGKONDANG	CISARANDI	70.115.382	122.583.051	216.000.000	408.698.433	408.698.000
8	32.03.02.2007	WARUNGKONDANG	CIKAROYA	73.026.578	122.583.051	216.000.000	411.609.629	411.610.000
9	32.03.02.2008	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	77.778.809	122.583.051	234.000.000	434.361.860	434.362.000
10	32.03.02.2009	WARUNGKONDANG	CIWALEN	88.192.910	122.583.051	234.000.000	444.775.961	444.776.000
11	32.03.02.2010	WARUNGKONDANG	TEGALLEGA	81.443.621	122.583.051	216.000.000	420.026.672	420.027.000
12	32.03.02.2011	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	74.303.077	122.583.051	234.000.000	430.886.127	430.886.000
13	32.03.02.2014	WARUNGKONDANG	BUNISARI	71.593.910	122.583.051	234.000.000	428.176.961	428.177.000
14	32.03.02.2016	WARUNGKONDANG	SUKAMULYA	60.604.316	122.583.051	216.000.000	399.187.366	399.187.000
15	32.03.02.2017	WARUNGKONDANG	CIEUNDEUR	48.545.682	122.583.051	216.000.000	387.128.733	387.129.000
16	32.03.02.2018	WARUNGKONDANG	MEKARWANGI	81.431.839	122.583.051	216.000.000	420.014.890	420.015.000
17	32.03.03.2001	CIBEBER	CIPETIR	78.593.044	122.583.051	216.000.000	417.176.095	417.176.000
18	32.03.03.2002	CIBEBER	CIHAUR	53.087.984	122.583.051	216.000.000	391.671.035	391.671.000
19	32.03.03.2003	CIBEBER	CIMANGGU	67.688.364	122.583.051	216.000.000	406.271.415	406.271.000
20	32.03.03.2004	CIBEBER	CIBAREGBEG	76.788.259	122.583.051	126.000.000	325.371.309	325.371.000
21	32.03.03.2005	CIBEBER	SUKARAHARJA	88.128.306	122.583.051	216.000.000	426.711.357	426.711.000
22	32.03.03.2006	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	88.351.347	122.583.051	252.000.000	462.934.398	462.934.000
23	32.03.03.2007	CIBEBER	MAYAK	63.305.698	122.583.051	216.000.000	401.888.749	401.889.000
24	32.03.03.2008	CIBEBER	CIKONDANG	48.701.884	122.583.051	216.000.000	387.284.935	387.285.000
25	32.03.03.2009	CIBEBER	CIBOKOR	160.199.720	122.583.051	252.000.000	534.782.771	534.783.000
26	32.03.03.2010	CIBEBER	SALAGEDANG	93.885.233	122.583.051	216.000.000	432.468.284	432.468.000
27	32.03.03.2011	CIBEBER	KARANGNUNGGAL	80.634.556	122.583.051	216.000.000	419.217.607	419.218.000
28	32.03.03.2012	CIBEBER	KANOMAN	114.280.561	122.583.051	252.000.000	488.863.612	488.864.000
29	32.03.03.2013	CIBEBER	SUKAMAJU	63.391.849	122.583.051	216.000.000	401.974.900	401.975.000
30	32.03.03.2014	CIBEBER	GIRIMULYA	86.480.419	122.583.051	216.000.000	425.063.470	425.063.000
31	32.03.03.2015	CIBEBER	CISALAK	56.286.023	122.583.051	216.000.000	394.869.074	394.869.000
32	32.03.03.2016	CIBEBER	CIBADAK	84.975.747	122.583.051	216.000.000	423.558.798	423.559.000
33	32.03.03.2017	CIBEBER	SUKAMANAH	74.529.087	122.583.051	216.000.000	413.112.138	413.112.000
34	32.03.03.2018	CIBEBER	SALAMNUNGGAL	65.614.692	122.583.051	198.000.000	386.197.743	386.198.000
35	32.03.04.2001	CILAKU	RANCAGOONG	77.839.652	122.583.051	234.000.000	434.422.703	434.423.000
36	32.03.04.2002	CILAKU	SUKASARI	119.067.630	122.583.051	234.000.000	475.650.681	475.651.000
37	32.03.04.2003	CILAKU	SIRNAGALIH	163.520.978	122.583.051	234.000.000	540.104.028	540.104.000
38	32.03.04.2004	CILAKU	SUKAKERTA	102.217.552	122.583.051	252.000.000	476.800.603	476.801.000
39	32.03.04.2005	CILAKU	CIBINONG HILIR	102.556.059	122.583.051	234.000.000	459.139.110	459.139.000
40	32.03.04.2006	CILAKU	RAHONG	94.434.847	122.583.051	252.000.000	469.017.898	469.018.000

43	32.03.04.2009	CILAKU	CIHARASHAS	95.317.674	122.583.051	234.000.000	451.900.725	451.901.000
44	32.03.04.2010	CILAKU	MULYASARI	81.188.833	122.583.051	234.000.000	437.771.884	437.772.000
45	32.03.05.2001	CIRANJANG	CIRANJANG	166.861.546	122.583.051	216.000.000	505.444.597	505.445.000
46	32.03.05.2002	CIRANJANG	SINDANGJAYA	72.586.744	122.583.051	216.000.000	411.169.795	411.170.000
47	32.03.05.2004	CIRANJANG	CIBIUK	96.812.055	122.583.051	216.000.000	435.395.106	435.395.000
48	32.03.05.2005	CIRANJANG	GUNUNGSARI	84.591.142	122.583.051	216.000.000	423.174.193	423.174.000
49	32.03.05.2006	CIRANJANG	KARANGWANGI	47.099.722	122.583.051	198.000.000	367.682.773	367.683.000
50	32.03.05.2007	CIRANJANG	NANGGALAMEKAR	112.078.621	122.583.051	216.000.000	450.661.672	450.662.000
51	32.03.05.2008	CIRANJANG	KERTAJAYA	83.332.296	122.583.051	216.000.000	421.915.346	421.915.000
52	32.03.05.2009	CIRANJANG	SINDANGSARI	61.618.523	122.583.051	216.000.000	400.201.574	400.202.000
53	32.03.05.2012	CIRANJANG	MEKARGALIH	72.321.987	122.583.051	216.000.000	410.905.038	410.905.000
54	32.03.06.2001	BOJONGPICUNG	HEGARMANAH	69.806.612	122.583.051	216.000.000	408.389.663	408.390.000
55	32.03.06.2002	BOJONGPICUNG	BOJONGPICUNG	78.952.123	122.583.051	198.000.000	399.535.174	399.535.000
56	32.03.06.2004	BOJONGPICUNG	CIBARENGKOK	66.389.059	122.583.051	216.000.000	404.972.110	404.972.000
57	32.03.06.2006	BOJONGPICUNG	KEMANG	129.475.788	122.583.051	216.000.000	468.058.839	468.059.000
58	32.03.06.2007	BOJONGPICUNG	SUKAJAYA	68.712.062	122.583.051	216.000.000	407.295.113	407.295.000
59	32.03.06.2008	BOJONGPICUNG	JATI	95.316.093	122.583.051	252.000.000	469.899.144	469.899.000
60	32.03.06.2009	BOJONGPICUNG	CIKONDANG	48.682.835	122.583.051	198.000.000	369.265.886	369.266.000
61	32.03.06.2010	BOJONGPICUNG	SUKARAMA	102.927.144	122.583.051	216.000.000	441.510.195	441.510.000
62	32.03.06.2012	BOJONGPICUNG	SUKARATU	97.668.496	122.583.051	216.000.000	436.251.546	436.252.000
63	32.03.06.2013	BOJONGPICUNG	NEGLASARI	69.665.784	122.583.051	216.000.000	408.248.835	408.249.000
64	32.03.06.2014	BOJONGPICUNG	JATISARI	72.593.736	122.583.051	216.000.000	411.176.787	411.177.000
65	32.03.07.2001	KARANGTENGAH	SUKAMANAH	70.060.390	122.583.051	234.000.000	426.643.441	426.643.000
66	32.03.07.2002	KARANGTENGAH	BOJONG	154.125.876	122.583.051	234.000.000	510.708.927	510.709.000
67	32.03.07.2003	KARANGTENGAH	SINDANGLAKA	79.750.449	122.583.051	216.000.000	418.333.500	418.333.000
68	32.03.07.2004	KARANGTENGAH	MALEBER	58.777.521	122.583.051	198.000.000	379.360.572	379.361.000
69	32.03.07.2005	KARANGTENGAH	CIHERANG	97.064.865	122.583.051	234.000.000	453.647.916	453.648.000
70	32.03.07.2006	KARANGTENGAH	SUKAMANTRI	66.281.759	122.583.051	234.000.000	422.864.810	422.865.000
71	32.03.07.2007	KARANGTENGAH	SUKASARANA	46.266.391	122.583.051	216.000.000	384.849.441	384.849.000
72	32.03.07.2008	KARANGTENGAH	SUKASARI	56.544.212	122.583.051	216.000.000	395.127.263	395.127.000
73	32.03.07.2009	KARANGTENGAH	BABAKANCARINGIN	79.497.799	122.583.051	216.000.000	418.080.849	418.081.000
74	32.03.07.2010	KARANGTENGAH	SABANDAR	109.132.664	122.583.051	252.000.000	483.715.715	483.716.000
75	32.03.07.2011	KARANGTENGAH	SINDANGASIH	53.868.285	122.583.051	216.000.000	392.451.336	392.451.000
76	32.03.07.2012	KARANGTENGAH	SUKATARIS	75.223.705	122.583.051	198.000.000	395.806.756	395.807.000
77	32.03.07.2013	KARANGTENGAH	LANGENSARI	56.355.999	122.583.051	234.000.000	412.939.050	412.939.000
78	32.03.07.2014	KARANGTENGAH	HEGARMANAH	78.078.896	122.583.051	234.000.000	434.661.947	434.662.000
79	32.03.07.2015	KARANGTENGAH	SUKAJADI	75.158.980	122.583.051	216.000.000	413.742.031	413.742.000
80	32.03.07.2016	KARANGTENGAH	SUKAMULYA	43.359.790	122.583.051	252.000.000	417.942.840	417.943.000
81	32.03.08.2001	MANDE	KADEMANGAN	79.924.443	122.583.051	234.000.000	436.507.494	436.507.000
82	32.03.08.2002	MANDE	BOBOJONG	176.351.109	122.583.051	252.000.000	550.934.160	550.934.000
83	32.03.08.2003	MANDE	JAMALI	141.802.251	122.583.051	234.000.000	498.385.302	498.385.000
84	32.03.08.2004	MANDE	CIKIDANGBAYABANG	64.131.368	122.583.051	216.000.000	402.714.419	402.714.000
85	32.03.08.2005	MANDE	MANDE	70.469.595	122.583.051	234.000.000	427.052.646	427.053.000
86	32.03.08.2006	MANDE	MULYASARI	59.383.945	122.583.051	234.000.000	415.966.996	415.967.000
87	32.03.08.2007	MANDE	CIANDAM	76.266.700	122.583.051	234.000.000	428.949.770	428.950.000

89	32.03.08.2009	MANDE	LEUWIKOJA	34.100.766	122.583.051	216.000.000	372.683.817	372.684.000
90	32.03.08.2010	MANDE	MEKARJAYA	61.539.327	122.583.051	216.000.000	400.122.378	400.122.000
91	32.03.08.2011	MANDE	KUTAWARINGIN	68.165.429	122.583.051	216.000.000	406.748.480	406.748.000
92	32.03.08.2012	MANDE	MURNISARI	54.819.806	122.583.051	216.000.000	393.402.856	393.403.000
93	32.03.09.2001	SUKALUYU	SELAJAMBE	83.388.096	122.583.051	234.000.000	439.971.147	439.971.000
94	32.03.09.2002	SUKALUYU	SUKAMULYA	93.235.046	122.583.051	216.000.000	431.818.097	431.818.000
95	32.03.09.2003	SUKALUYU	PANYUSUHAN	79.135.428	122.583.051	234.000.000	435.718.479	435.718.000
96	32.03.09.2004	SUKALUYU	TANJUNGSARI	107.752.713	122.583.051	216.000.000	446.335.764	446.336.000
97	32.03.09.2005	SUKALUYU	SINDANGRAJA	100.975.251	122.583.051	234.000.000	457.558.302	457.558.000
98	32.03.09.2006	SUKALUYU	MEKARJAYA	50.259.866	122.583.051	234.000.000	406.842.917	406.843.000
99	32.03.09.2007	SUKALUYU	SUKASIRNA	104.680.761	122.583.051	234.000.000	461.263.812	461.264.000
100	32.03.09.2008	SUKALUYU	SUKALUYU	87.600.042	122.583.051	234.000.000	444.183.093	444.183.000
101	32.03.09.2009	SUKALUYU	BABAKANSARI	76.663.818	122.583.051	216.000.000	415.246.869	415.247.000
102	32.03.09.2010	SUKALUYU	HEGARMANAH	65.010.341	122.583.051	234.000.000	421.593.392	421.593.000
103	32.03.10.2001	PACET	CIHERANG	159.059.028	122.583.051	216.000.000	497.642.079	497.642.000
104	32.03.10.2003	PACET	CIBODAS	100.304.036	122.583.051	252.000.000	474.887.087	474.887.000
105	32.03.10.2005	PACET	SUKANAGALIH	203.155.034	122.583.051	288.000.000	613.738.085	613.738.000
106	32.03.10.2007	PACET	CIPENDAWA	171.996.545	122.583.051	288.000.000	582.579.596	582.580.000
107	32.03.10.2010	PACET	CIPUTRI	103.481.290	122.583.051	234.000.000	460.064.341	460.064.000
108	32.03.10.2012	PACET	GADOG	91.453.875	122.583.051	234.000.000	448.036.926	448.037.000
109	32.03.10.2013	PACET	SUKATANI	127.501.781	122.583.051	234.000.000	484.084.832	484.085.000
110	32.03.11.2001	CUGENANG	SUKAMANAH	86.207.840	122.583.051	216.000.000	424.790.891	424.791.000
111	32.03.11.2002	CUGENANG	GASOL	64.901.519	122.583.051	234.000.000	421.484.570	421.485.000
112	32.03.11.2003	CUGENANG	CIJEDIL	92.520.937	122.583.051	216.000.000	431.103.987	431.104.000
113	32.03.11.2004	CUGENANG	CIBEUREUM	86.869.044	122.583.051	252.000.000	461.452.095	461.452.000
114	32.03.11.2005	CUGENANG	NYALINDUNG	38.584.335	122.583.051	216.000.000	377.167.386	377.167.000
115	32.03.11.2006	CUGENANG	MANGUNKERTA	56.877.385	122.583.051	198.000.000	377.460.436	377.460.000
116	32.03.11.2007	CUGENANG	SARAMPAD	86.537.814	122.583.051	234.000.000	443.120.865	443.121.000
117	32.03.11.2008	CUGENANG	TALAGA	66.213.012	122.583.051	216.000.000	404.796.063	404.796.000
118	32.03.11.2009	CUGENANG	SUKAJAYA	40.854.027	122.583.051	234.000.000	397.437.078	397.437.000
119	32.03.11.2010	CUGENANG	CIBULAKAN	54.506.207	122.583.051	234.000.000	411.089.258	411.089.000
120	32.03.11.2011	CUGENANG	BENJOT	42.477.157	122.583.051	216.000.000	381.060.208	381.060.000
121	32.03.11.2012	CUGENANG	SUKAMULYA	79.222.040	122.583.051	216.000.000	417.805.091	417.805.000
122	32.03.11.2013	CUGENANG	WANGUNJAYA	72.523.215	122.583.051	234.000.000	429.106.266	429.106.000
123	32.03.11.2014	CUGENANG	CIRUMPUT	84.368.594	122.583.051	234.000.000	440.951.645	440.952.000
124	32.03.11.2015	CUGENANG	PADALUYU	102.274.770	122.583.051	216.000.000	440.857.821	440.858.000
125	32.03.11.2016	CUGENANG	GALUDRA	46.531.154	122.583.051	216.000.000	385.114.204	385.114.000
126	32.03.12.2001	CIKALONGKULON	SUKAGALIH	59.043.798	122.583.051	234.000.000	415.626.849	415.627.000
127	32.03.12.2002	CIKALONGKULON	GUDANG	79.784.617	122.583.051	216.000.000	418.367.668	418.368.000
128	32.03.12.2003	CIKALONGKULON	CINANGSI	72.557.162	122.583.051	216.000.000	411.140.213	411.140.000
129	32.03.12.2004	CIKALONGKULON	CIJAGANG	55.709.328	122.583.051	216.000.000	394.292.379	394.292.000
130	32.03.12.2005	CIKALONGKULON	MAJALAYA	80.167.512	122.583.051	252.000.000	454.750.563	454.751.000
131	32.03.12.2006	CIKALONGKULON	KAMURANG	28.387.377	122.583.051	198.000.000	348.970.427	348.970.000
132	32.03.12.2007	CIKALONGKULON	WARUDYOYONG	65.430.228	122.583.051	216.000.000	404.013.279	404.013.000
133	32.03.12.2008	CIKALONGKULON						

135	32.04.12.2010	CIKALONGKULON	SUKAMULYA	43.177.458	122.583.051	234.000.000	399.760.509	399.761.000
136	32.03.12.2011	CIKALONGKULON	PADAJAYA	69.360.670	122.583.051	234.000.000	425.943.721	425.944.000
137	32.03.12.2012	CIKALONGKULON	CIGUNUNGERANG	79.017.789	122.583.051	252.000.000	453.600.840	453.601.000
138	32.03.12.2013	CIKALONGKULON	NEGLASARI	58.971.706	122.583.051	216.000.000	397.554.757	397.555.000
139	32.03.12.2014	CIKALONGKULON	MEKARGALIH	107.107.493	122.583.051	234.000.000	463.690.544	463.691.000
140	32.03.12.2015	CIKALONGKULON	LEMBAHSARI	68.109.154	122.583.051	216.000.000	406.692.205	406.692.000
141	32.03.12.2016	CIKALONGKULON	MENTENGSAI	58.342.162	122.583.051	234.000.000	414.925.213	414.925.000
142	32.03.12.2017	CIKALONGKULON	MEKARSARI	66.621.377	122.583.051	234.000.000	423.204.428	423.204.000
143	32.03.12.2018	CIKALONGKULON	MEKARMULYA	56.875.007	122.583.051	216.000.000	395.458.057	395.458.000
144	32.03.13.2001	SUKARESMI	CIKANYERE	83.697.276	122.583.051	234.000.000	440.280.327	440.280.000
145	32.03.13.2002	SUKARESMI	CIKANCANA	80.552.893	122.583.051	234.000.000	437.135.944	437.136.000
146	32.03.13.2003	SUKARESMI	CIWALEN	103.814.450	122.583.051	252.000.000	478.397.500	478.398.000
147	32.03.13.2004	SUKARESMI	KAWUNGLUWUK	81.999.867	122.583.051	234.000.000	438.582.918	438.583.000
148	32.03.13.2005	SUKARESMI	CIBADAK	78.769.479	122.583.051	252.000.000	453.352.530	453.353.000
149	32.03.13.2006	SUKARESMI	SUKAMAHI	88.102.258	122.583.051	252.000.000	462.685.309	462.685.000
150	32.03.13.2007	SUKARESMI	SUKARESMI	89.478.423	122.583.051	252.000.000	464.061.474	464.061.000
151	32.03.13.2008	SUKARESMI	CIBANTENG	74.021.169	122.583.051	252.000.000	448.604.220	448.604.000
152	32.03.13.2009	SUKARESMI	KUBANG	71.537.919	122.583.051	252.000.000	446.120.970	446.121.000
153	32.03.13.2010	SUKARESMI	PAKUON	102.807.728	122.583.051	252.000.000	477.390.779	477.391.000
154	32.03.13.2011	SUKARESMI	RAWABELUT	41.922.893	122.583.051	216.000.000	380.505.943	380.506.000
155	32.03.14.2001	SUKANAGARA	SUKANAGARA	86.257.548	122.583.051	234.000.000	442.840.599	442.841.000
156	32.03.14.2002	SUKANAGARA	SUKAJEMBAR	77.327.185	122.583.051	234.000.000	433.910.236	433.910.000
157	32.03.14.2003	SUKANAGARA	SUKAKARYA	83.637.212	122.583.051	198.000.000	404.220.263	404.220.000
158	32.03.14.2004	SUKANAGARA	CIGUHA	75.024.105	122.583.051	234.000.000	431.607.156	431.607.000
159	32.03.14.2005	SUKANAGARA	SUKAMEKAR	146.819.788	122.583.051	234.000.000	503.402.839	503.403.000
160	32.03.14.2006	SUKANAGARA	GUNUNGSARI	145.068.228	122.583.051	234.000.000	501.651.279	501.651.000
161	32.03.14.2007	SUKANAGARA	SUKALAKSANA	83.935.206	122.583.051	198.000.000	404.518.257	404.518.000
162	32.03.14.2008	SUKANAGARA	SUKARAME	83.403.098	122.583.051	216.000.000	421.986.149	421.986.000
163	32.03.14.2009	SUKANAGARA	SINDANGSARI	71.694.784	122.583.051	198.000.000	392.277.835	392.278.000
164	32.03.14.2010	SUKANAGARA	JAYAGIRI	64.340.928	122.583.051	234.000.000	420.923.979	420.924.000
165	32.03.15.2001	CAMPAKA	CIDADAP	107.796.064	122.583.051	234.000.000	464.379.115	464.379.000
166	32.03.15.2002	CAMPAKA	CIMENTENG	98.511.267	122.583.051	234.000.000	455.094.318	455.094.000
167	32.03.15.2003	CAMPAKA	SUSUKAN	94.880.505	122.583.051	252.000.000	469.463.556	469.464.000
168	32.03.15.2004	CAMPAKA	SUKAJADI	93.010.699	122.583.051	234.000.000	449.593.750	449.594.000
169	32.03.15.2005	CAMPAKA	SUKADANA	86.071.490	122.583.051	216.000.000	424.654.541	424.655.000
170	32.03.15.2006	CAMPAKA	MARGALUYU	69.357.610	122.583.051	234.000.000	425.940.661	425.941.000
171	32.03.15.2007	CAMPAKA	KARYAMUKTI	101.204.743	122.583.051	234.000.000	457.787.794	457.788.000
172	32.03.15.2008	CAMPAKA	CAMPAKA	98.097.313	122.583.051	234.000.000	454.680.364	454.680.000
173	32.03.15.2009	CAMPAKA	WANGUNJAYA	111.257.693	122.583.051	216.000.000	449.840.743	449.841.000
174	32.03.15.2010	CAMPAKA	GIRIMUKTI	89.791.154	122.583.051	216.000.000	428.374.205	428.374.000
175	32.03.15.2011	CAMPAKA	MEKARJAYA	86.458.916	122.583.051	252.000.000	461.041.967	461.042.000
176	32.03.16.2001	TAKOKAK	PASAWAHAN	87.230.393	122.583.051	252.000.000	461.813.444	461.813.000
177	32.03.16.2002	TAKOKAK	SINDANGRESMI	98.128.728	122.583.051	252.000.000	472.711.779	472.712.000
178	32.03.16.2003	TAKOKAK	SINDANGHAYU	105.236.018	122.583.051	270.000.000	497.819.069	497.819.000
179	32.03.16.2004	TAKOKAK						

181	32.03.16.2006	TAKOKAK	BUNGBANGSARI	95.436.758	122.583.051	234.000.000	452.019.809	452.020.000
182	32.03.16.2007	TAKOKAK	CISUJEN	60.459.102	122.583.051	216.000.000	399.042.153	399.042.000
183	32.03.16.2008	TAKOKAK	HEGARMANAH	68.996.399	122.583.051	234.000.000	425.579.450	425.579.000
184	32.03.16.2009	TAKOKAK	WARINGINSARI	69.734.893	122.583.051	252.000.000	444.317.944	444.318.000
185	32.03.17.2003	KADUPANDAK	SUKASARI	38.555.948	122.583.051	198.000.000	359.138.999	359.139.000
186	32.03.17.2006	KADUPANDAK	PASIRDALEM	47.782.747	122.583.051	234.000.000	404.365.798	404.366.000
187	32.03.17.2008	KADUPANDAK	TALAGASARI	48.641.697	122.583.051	216.000.000	387.224.748	387.225.000
188	32.03.17.2009	KADUPANDAK	BOJONGKASIH	41.426.297	122.583.051	234.000.000	398.009.348	398.009.000
189	32.03.17.2010	KADUPANDAK	WARGAASIH	62.120.746	122.583.051	234.000.000	418.703.797	418.704.000
190	32.03.17.2011	KADUPANDAK	SUKARAJA	38.547.236	122.583.051	198.000.000	359.130.286	359.130.000
191	32.03.17.2014	KADUPANDAK	SUKAKERTA	70.135.304	122.583.051	252.000.000	444.718.355	444.718.000
192	32.03.17.2016	KADUPANDAK	NEGLASARI	64.892.503	122.583.051	234.000.000	421.475.554	421.476.000
193	32.03.17.2017	KADUPANDAK	SUKARESMI	66.152.116	122.583.051	252.000.000	440.735.167	440.735.000
194	32.03.17.2019	KADUPANDAK	WARGASARI	61.732.585	122.583.051	216.000.000	400.315.635	400.316.000
195	32.03.17.2020	KADUPANDAK	SUKARAHARJA	50.421.512	122.583.051	234.000.000	407.004.563	407.005.000
196	32.03.17.2021	KADUPANDAK	KADUPANDAK	31.345.239	122.583.051	198.000.000	351.928.290	351.928.000
197	32.03.17.2022	KADUPANDAK	GANDASARI	47.948.103	122.583.051	216.000.000	386.531.154	386.531.000
198	32.03.17.2023	KADUPANDAK	SINDANGSARI	30.724.245	122.583.051	216.000.000	369.307.296	369.307.000
199	32.03.18.2001	PAGELARAN	PAGELARAN	75.574.295	122.583.051	288.000.000	486.157.345	486.157.000
200	32.03.18.2002	PAGELARAN	PANGADEGAN	83.675.928	122.583.051	252.000.000	458.258.979	458.259.000
201	32.03.18.2004	PAGELARAN	GELAR ANYAR	50.073.805	122.583.051	234.000.000	406.656.856	406.657.000
202	32.03.18.2005	PAGELARAN	BUNIWANGI	104.944.460	122.583.051	270.000.000	497.527.511	497.528.000
203	32.03.18.2007	PAGELARAN	SINDANGKERTA	78.334.764	122.583.051	252.000.000	452.917.815	452.918.000
204	32.03.18.2008	PAGELARAN	PASIRBARU	89.643.554	122.583.051	252.000.000	464.226.605	464.227.000
205	32.03.18.2009	PAGELARAN	BUNJAYA	104.586.910	122.583.051	252.000.000	479.169.961	479.170.000
206	32.03.18.2010	PAGELARAN	SITUHIANG	186.946.081	122.583.051	270.000.000	579.529.132	579.529.000
207	32.03.18.2011	PAGELARAN	MEKARSARI	73.080.823	122.583.051	234.000.000	429.653.874	429.664.000
208	32.03.18.2012	PAGELARAN	KERTARAHARJA	53.791.144	122.583.051	234.000.000	410.374.195	410.374.000
209	32.03.18.2013	PAGELARAN	SELAGEDANG	65.393.585	122.583.051	270.000.000	457.976.636	457.977.000
210	32.03.18.2014	PAGELARAN	PADAMAJU	54.635.023	122.583.051	252.000.000	429.218.074	429.218.000
211	32.03.18.2015	PAGELARAN	KARANGHARJA	45.482.099	122.583.051	234.000.000	402.065.150	402.065.000
212	32.03.18.2018	PAGELARAN	SUKAMAJU	52.157.508	122.583.051	234.000.000	408.740.559	408.741.000
213	32.03.19.2001	TANGGEUNG	TANGGEUNG	59.453.012	122.583.051	234.000.000	416.036.062	416.036.000
214	32.03.19.2002	TANGGEUNG	RAWAGEDE	45.346.291	122.583.051	198.000.000	365.929.342	365.929.000
215	32.03.19.2003	TANGGEUNG	CILONGSONG	66.717.159	122.583.051	216.000.000	405.300.210	405.300.000
216	32.03.19.2004	TANGGEUNG	MARGALUYU	58.697.971	122.583.051	216.000.000	397.281.022	397.281.000
217	32.03.19.2005	TANGGEUNG	KARANGTENGAH	50.620.681	122.583.051	252.000.000	425.203.732	425.204.000
218	32.03.19.2006	TANGGEUNG	PAGERMANEUH	74.607.375	122.583.051	234.000.000	431.190.426	431.190.000
219	32.03.19.2007	TANGGEUNG	BOJONGPETIR	104.223.393	122.583.051	234.000.000	460.806.443	460.806.000
220	32.03.19.2009	TANGGEUNG	PASIR JAMBU	67.931.626	122.583.051	234.000.000	424.514.676	424.515.000
221	32.03.19.2010	TANGGEUNG	SIRNAJAYA	82.471.637	122.583.051	252.000.000	457.054.688	457.055.000
222	32.03.19.2013	TANGGEUNG	KERTAJAYA	64.186.531	122.583.051	252.000.000	438.769.582	438.770.000
223	32.03.19.2014	TANGGEUNG	SUKAJAYA	44.234.199	122.583.051	234.000.000	400.817.249	400.817.000
224	32.03.19.2015	TANGGEUNG	PADALUYU	59.134.608	122.583.051	234.000.000	415.717.659	415.718.000
225	32.03.20.2001	CIBINONG						

			5	6	7	8	9	
227	32.02.20.2003	CIBINONG	SUKAJADI	92.703.286	122.583.051	234.000.000	449.286.337	449.286.000
228	32.03.20.2004	CIBINONG	PANYINDANGAN	115.253.293	122.583.051	252.000.000	489.836.344	489.836.000
229	32.03.20.2005	CIBINONG	PADASUKA	81.497.421	122.583.051	270.000.000	474.080.472	474.080.000
230	32.03.20.2006	CIBINONG	CIMASKARA	86.154.488	122.583.051	270.000.000	478.737.539	478.738.000
231	32.03.20.2007	CIBINONG	PAMOYANAN	85.271.720	122.583.051	252.000.000	459.854.770	459.855.000
232	32.03.20.2008	CIBINONG	BATULAWANG	123.162.187	122.583.051	234.000.000	479.745.238	479.745.000
233	32.03.20.2009	CIBINONG	SUKAMEKAR	92.696.378	122.583.051	252.000.000	467.279.428	467.279.000
234	32.03.20.2010	CIBINONG	HAMERANG	54.699.912	122.583.051	234.000.000	411.282.962	411.283.000
235	32.03.20.2011	CIBINONG	GIRIJAYA	88.203.109	122.583.051	234.000.000	444.786.160	444.786.000
236	32.03.20.2012	CIBINONG	WARGALUYU	78.446.768	122.583.051	216.000.000	417.029.819	417.030.000
237	32.03.20.2013	CIBINONG	MEKARMUkti	61.950.489	122.583.051	234.000.000	418.533.540	418.534.000
238	32.03.20.2014	CIBINONG	CIBURIAL	23.664.241	122.583.051	234.000.000	380.247.291	380.247.000
239	32.03.21.2001	SINDANGBARANG	SAGANTEN	76.912.583	122.583.051	234.000.000	433.495.634	433.496.000
240	32.03.21.2002	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	123.293.169	122.583.051	234.000.000	479.876.220	479.876.000
241	32.03.21.2003	SINDANGBARANG	JATISARI	119.087.649	122.583.051	216.000.000	457.670.700	457.671.000
242	32.03.21.2004	SINDANGBARANG	SIRNAGALIH	115.629.344	122.583.051	252.000.000	490.212.395	490.212.000
243	32.03.21.2005	SINDANGBARANG	JAYAGIRI	83.543.428	122.583.051	234.000.000	440.126.479	440.126.000
244	32.03.21.2006	SINDANGBARANG	KERTASARI	64.477.985	122.583.051	234.000.000	421.061.036	421.061.000
245	32.03.21.2007	SINDANGBARANG	GIRIMUKTI	93.032.108	122.583.051	252.000.000	467.615.159	467.615.000
246	32.03.21.2008	SINDANGBARANG	TALAGASARI	71.648.833	122.583.051	234.000.000	428.231.884	428.232.000
247	32.03.21.2009	SINDANGBARANG	HEGARSARI	52.487.334	122.583.051	234.000.000	409.070.384	409.070.000
248	32.03.21.2010	SINDANGBARANG	MEKARLAKSANA	52.840.290	122.583.051	216.000.000	391.423.341	391.423.000
249	32.03.21.2011	SINDANGBARANG	KERTAMUKTI	29.771.349	122.583.051	216.000.000	368.354.400	368.354.000
250	32.03.22.2004	AGRABINTA	SUKAMANAH	108.674.138	122.583.051	234.000.000	465.257.189	465.257.000
251	32.03.22.2005	AGRABINTA	BOJONGKASO	93.022.615	122.583.051	234.000.000	449.605.666	449.606.000
252	32.03.22.2006	AGRABINTA	BUNISARI	52.663.350	122.583.051	234.000.000	409.246.400	409.246.000
253	32.03.22.2007	AGRABINTA	WANASARI	91.299.954	122.583.051	252.000.000	465.883.004	465.883.000
254	32.03.22.2010	AGRABINTA	SINARLAUT	95.284.683	122.583.051	252.000.000	469.867.733	469.868.000
255	32.03.22.2014	AGRABINTA	NEGLASARI	49.086.862	122.583.051	216.000.000	387.669.913	387.670.000
256	32.03.22.2016	AGRABINTA	KARANGSARI	36.661.628	122.583.051	216.000.000	375.244.678	375.245.000
257	32.03.22.2017	AGRABINTA	MULYASARI	58.170.622	122.583.051	216.000.000	396.753.673	396.754.000
258	32.03.22.2018	AGRABINTA	TANJUNGSARI	89.330.527	122.583.051	216.000.000	427.913.578	427.914.000
259	32.03.22.2019	AGRABINTA	MEKARSARI	119.525.406	122.583.051	234.000.000	476.108.457	476.108.000
260	32.03.22.2022	AGRABINTA	WANGUN JAYA	63.245.708	122.583.051	252.000.000	437.828.759	437.829.000
261	32.03.23.2001	CIDAUN	CIDAMAR	128.492.124	122.583.051	252.000.000	503.075.175	503.075.000
262	32.03.23.2002	CIDAUN	CIBULUH	91.188.450	122.583.051	198.000.000	411.771.501	411.772.000
263	32.03.23.2003	CIDAUN	CISALAK	75.837.447	122.583.051	216.000.000	414.420.498	414.420.000
264	32.03.23.2004	CIDAUN	CIMARAGANG	100.145.273	122.583.051	198.000.000	420.728.324	420.728.000
265	32.03.23.2005	CIDAUN	MEKARJAYA	102.489.600	122.583.051	216.000.000	441.072.651	441.073.000
266	32.03.23.2006	CIDAUN	KERTAJADI	222.871.801	122.583.051	216.000.000	561.454.852	561.455.000
267	32.03.23.2007	CIDAUN	SUKAPURA	109.200.924	122.583.051	252.000.000	483.783.975	483.784.000
268	32.03.23.2008	CIDAUN	GELARPAWITAN	186.234.541	122.583.051	234.000.000	542.817.592	542.818.000
269	32.03.23.2009	CIDAUN	KARANGWANGI	130.288.279	122.583.051	216.000.000	468.871.330	468.871.000
270	32.03.23.2010	CIDAUN	KARYABAKTI	105.266.169	122.583.051	234.000.000	461.849.220	461.849.000
271	32.03.23.2011	CIDAUN						

273	32.08.23.2013	CIDAUN	PUNCAKBARU	66.195.510	122.583.051	216.000.000	404.778.561	404.779.000
274	32.03.23.2014	CIDAUN	GELARWANGI	46.106.918	122.583.051	198.000.000	366.689.969	366.690.000
275	32.03.24.2001	NARINGGUL	NARINGGUL	75.415.609	122.583.051	252.000.000	449.998.660	449.999.000
276	32.03.24.2002	NARINGGUL	BALEGEDE	119.883.744	122.583.051	270.000.000	512.466.794	512.467.000
277	32.03.24.2003	NARINGGUL	WANGUNJAYA	130.270.489	122.583.051	270.000.000	522.853.539	522.854.000
278	32.03.24.2004	NARINGGUL	MEKARSARI	149.804.085	122.583.051	234.000.000	506.387.136	506.387.000
279	32.03.24.2005	NARINGGUL	CINERANG	85.216.604	122.583.051	234.000.000	441.799.654	441.800.000
280	32.03.24.2006	NARINGGUL	WANASARI	92.793.743	122.583.051	270.000.000	485.376.794	485.377.000
281	32.03.24.2007	NARINGGUL	SUKABAKTI	98.834.079	122.583.051	252.000.000	473.417.130	473.417.000
282	32.03.24.2008	NARINGGUL	MALATI	83.541.446	122.583.051	216.000.000	422.124.497	422.124.000
283	32.03.24.2009	NARINGGUL	WANGUNSARI	121.795.063	122.583.051	234.000.000	478.378.114	478.378.000
284	32.03.24.2010	NARINGGUL	SUKAMULYA	127.442.220	122.583.051	252.000.000	502.025.271	502.025.000
285	32.03.24.2011	NARINGGUL	MARGASARI	72.601.109	122.583.051	234.000.000	429.184.160	429.184.000
286	32.03.25.2001	CAMPAKA MULYA	CIBANGGALA	55.290.444	122.583.051	216.000.000	393.873.495	393.873.000
287	32.03.25.2002	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAWARNA	70.644.390	122.583.051	216.000.000	409.227.441	409.227.000
288	32.03.25.2003	CAMPAKA MULYA	SUKASIRNA	131.588.145	122.583.051	234.000.000	488.171.196	488.171.000
289	32.03.25.2004	CAMPAKA MULYA	CAMPAKAMULYA	82.910.810	122.583.051	234.000.000	439.493.861	439.494.000
290	32.03.25.2005	CAMPAKA MULYA	SUKABUNGAH	75.252.217	122.583.051	252.000.000	449.835.268	449.835.000
291	32.03.26.2001	CIKADU	KALAPANUNGGAL	68.779.009	122.583.051	234.000.000	425.362.060	425.362.000
292	32.03.26.2002	CIKADU	CIKADU	162.016.190	122.583.051	270.000.000	554.599.241	554.599.000
293	32.03.26.2003	CIKADU	MEKARWANGI	84.356.763	122.583.051	270.000.000	476.939.814	476.940.000
294	32.03.26.2004	CIKADU	PADALUYU	82.580.639	122.583.051	216.000.000	421.163.690	421.164.000
295	32.03.26.2005	CIKADU	SUKAMULYA	76.510.931	122.583.051	252.000.000	451.093.982	451.094.000
296	32.03.26.2006	CIKADU	CISARANTEN	79.971.623	122.583.051	234.000.000	436.554.673	436.555.000
297	32.03.26.2007	CIKADU	MEKARLAKSANA	71.569.886	122.583.051	252.000.000	446.152.937	446.153.000
298	32.03.26.2008	CIKADU	SUKALUYU	69.355.349	122.583.051	234.000.000	425.938.400	425.938.000
299	32.03.26.2009	CIKADU	MEKARJAYA	33.385.830	122.583.051	216.000.000	371.968.880	371.969.000
300	32.03.26.2010	CIKADU	SUKAMANAH	93.010.141	122.583.051	234.000.000	449.593.192	449.593.000
301	32.03.27.2001	GEKBRONG	BANGBAYANG	69.446.214	122.583.051	234.000.000	426.029.265	426.029.000
302	32.03.27.2002	GEKBRONG	SONGGOM	67.072.748	122.583.051	234.000.000	423.655.799	423.656.000
303	32.03.27.2003	GEKBRONG	SUKARATU	67.105.677	122.583.051	252.000.000	441.688.728	441.689.000
304	32.03.27.2004	GEKBRONG	CIKANCANA	50.312.868	122.583.051	216.000.000	388.895.918	388.896.000
305	32.03.27.2005	GEKBRONG	KEBONPEUTEUY	94.428.556	122.583.051	234.000.000	451.011.607	451.012.000
306	32.03.27.2006	GEKBRONG	GEKBRONG	91.877.347	122.583.051	216.000.000	430.460.398	430.460.000
307	32.03.27.2007	GEKBRONG	CIKAHURIPAN	62.586.103	122.583.051	216.000.000	401.169.154	401.169.000
308	32.03.27.2008	GEKBRONG	CINTAASIH	69.727.007	122.583.051	234.000.000	426.310.058	426.310.000
309	32.03.28.2001	CIPANAS	CIPANAS	108.063.333	122.583.051	252.000.000	482.646.384	482.646.000
310	32.03.28.2002	CIPANAS	CIMACAN	170.327.556	122.583.051	252.000.000	544.910.607	544.911.000
311	32.03.28.2003	CIPANAS	CILOTO	104.993.882	122.583.051	216.000.000	443.576.933	443.577.000
312	32.03.28.2004	CIPANAS	SINDANGLAYA	132.531.221	122.583.051	234.000.000	489.114.272	489.114.000
313	32.03.28.2005	CIPANAS	BATULAWANG	225.580.760	122.583.051	306.000.000	654.163.811	654.160.000
314	32.03.28.2006	CIPANAS	PALASARI	136.879.521	122.583.051	252.000.000	511.462.572	511.463.000
315	32.03.28.2007	CIPANAS	SINDANGJAYA	132.722.547	122.583.051	252.000.000	507.305.598	507.306.000
316	32.03.29.2001	CIJATI	PARAKANTUGU	52.628.481	122.583.051	252.000.000	427.211.532	427.212.000

319	32.03.29.2004	CIJATI	PADAASIH	50.323.799	122.583.051	252.000.000	424.906.850	424.907.000
320	32.03.29.2005	CIJATI	CIBODAS	79.506.511	122.583.051	252.000.000	454.089.562	454.090.000
321	32.03.29.2006	CIJATI	SUKAMAHI	56.949.044	122.583.051	252.000.000	431.532.095	431.532.000
322	32.03.29.2007	CIJATI	SUKALUYU	80.780.884	122.583.051	234.000.000	437.363.935	437.364.000
323	32.03.29.2008	CIJATI	CARINGIN	41.572.315	122.583.051	234.000.000	398.155.366	398.155.000
324	32.03.29.2009	CIJATI	SINARBAKTI	39.792.859	122.583.051	216.000.000	378.375.910	378.376.000
325	32.03.29.2010	CIJATI	SUKAMAJU	42.923.611	122.583.051	234.000.000	399.506.662	399.507.000
326	32.03.30.2001	LELES	PUSAKASARI	33.124.777	122.583.051	234.000.000	389.707.828	389.708.000
327	32.03.30.2002	LELES	WALAHIR	54.050.631	122.583.051	234.000.000	410.633.682	410.634.000
328	32.03.30.2003	LELES	PURABAYA	54.871.182	122.583.051	252.000.000	429.454.232	429.454.000
329	32.03.30.2004	LELES	PUNCAKWANGI	62.652.374	122.583.051	234.000.000	419.235.424	419.235.000
330	32.03.30.2005	LELES	SUKAJAYA	66.579.793	122.583.051	234.000.000	423.162.844	423.163.000
331	32.03.30.2006	LELES	NAGASARI	37.424.653	122.583.051	216.000.000	376.007.704	376.008.000
332	32.03.30.2007	LELES	SUKASIRNA	74.017.267	122.583.051	216.000.000	412.600.318	412.600.000
333	32.03.30.2008	LELES	SUKAMULYA	55.806.950	122.583.051	234.000.000	412.390.001	412.390.000
334	32.03.30.2009	LELES	SIRNASARI	57.396.999	122.583.051	234.000.000	413.980.050	413.980.000
335	32.03.30.2010	LELES	KARYAMUKTI	57.731.586	122.583.051	234.000.000	414.314.637	414.315.000
336	32.03.30.2011	LELES	MANDALAWANGI	27.570.620	122.583.051	234.000.000	384.153.671	384.154.000
337	32.03.30.2012	LELES	SINDANGSARI	20.981.101	122.583.051	234.000.000	377.564.152	377.564.000
338	32.03.31.2001	HAURWANGI	HAURWANGI	81.422.102	122.583.051	216.000.000	420.005.153	420.005.000
339	32.03.31.2002	HAURWANGI	CIHEA	151.352.658	122.583.051	216.000.000	489.935.709	489.936.000
340	32.03.31.2003	HAURWANGI	RAMASARI	74.895.359	122.583.051	198.000.000	395.478.410	395.478.000
341	32.03.31.2004	HAURWANGI	SUKATANI	85.573.619	122.583.051	216.000.000	424.156.670	424.157.000
342	32.03.31.2005	HAURWANGI	MEKARWANGI	54.662.770	122.583.051	198.000.000	375.245.821	375.246.000
343	32.03.31.2006	HAURWANGI	KERTASARI	80.862.963	122.583.051	198.000.000	401.446.014	401.446.000
344	32.03.31.2007	HAURWANGI	CIPEUYEUM	73.634.797	122.583.051	216.000.000	412.217.848	412.218.000
345	32.03.31.2008	HAURWANGI	KERTAMUKTI	99.794.982	122.583.051	198.000.000	420.378.033	420.378.000
346	32.03.32.2001	PASIRKUDA	SIMPANG	50.298.962	122.583.051	234.000.000	406.882.013	406.882.000
347	32.03.32.2002	PASIRKUDA	KALIBARU	100.255.001	122.583.051	234.000.000	456.838.052	456.838.000
348	32.03.32.2003	PASIRKUDA	PUSAKAJAYA	91.203.680	122.583.051	234.000.000	447.786.731	447.787.000
349	32.03.32.2004	PASIRKUDA	KUBANG	62.293.859	122.583.051	234.000.000	418.876.910	418.877.000
350	32.03.32.2005	PASIRKUDA	GIRIMUKTI	56.073.169	122.583.051	234.000.000	412.656.220	412.656.000
351	32.03.32.2006	PASIRKUDA	KARANGJAYA	164.177.846	122.583.051	234.000.000	520.760.897	520.761.000
352	32.03.32.2007	PASIRKUDA	MEKARMULYA	45.756.976	122.583.051	234.000.000	402.340.027	402.340.000
353	32.03.32.2008	PASIRKUDA	GIRIJAYA	105.693.992	122.583.051	234.000.000	462.277.043	462.277.000
354	32.03.32.2009	PASIRKUDA	PADAMULYA	56.198.461	122.583.051	234.000.000	412.781.512	412.782.000
Total				28.929.600.000	43.394.400.000	81.684.000.000	154.008.000.000	154.008.000.000

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH